

3

by 1 2

Submission date: 15-Dec-2020 12:10AM (UTC-0800)

Submission ID: 1475623223

File name: Artikel_pengabdian_masyarakat__1_update.doc (1.1M)

Word count: 2346

Character count: 15779

PENINGKATAN LITERASI AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA PEMERINTAHAN GURU SMK AKUNTANSI SIDOARJO

Abstrak: Pemahaman mengenai pengelolaan keuangan desa tidak menjadi otonomi dari perangkat desa itu sendiri. Institusi pendidikan sebagai penyedia tenaga terampil menjadi bagian yang wajib memahami implementasi akuntansi desa dalam sistem keuangan desa. Sebagai upaya praktis kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka dilakukan pelatihan bagi kelompok guru SMK Sidoarjo untuk mata pelajaran Ekonomi dan Akuntansi. Pelatihan ini sekaligus sebagai penyiapan guru untuk mengimplementasikan pembelajaran akuntansi desa dalam kurikulum baru. Metode pelatihan diberikan dalam bentuk diskusi dan tutorial. Dalam diskusi, pengajar memberikan materi awal mengenai pengantar akuntansi untuk pemerintahan dan metode tutorial diberikan dalam bentuk uji coba software akuntansi desa (open source). Hasil pelatihan menunjukkan bahwa kemampuan guru memahami akuntansi sudah cukup memadai, namun demikian penguasaan *software* akuntansi desa masih perlu ditingkatkan untuk menunjang pembelajaran akuntansi desa yang akan diberikan kepada siswa dalam bentuk mata pelajaran praktikum akuntansi.

Kata Kunci: Akuntansi desa, pelatihan guru, aplikasi keuangan desa

Abstract: Understanding of village financial management does not constitute autonomy from the village apparatus itself. As providers of skilled personnel, educational institutions are part of the obligation to understand the implementation of Akuntansi Desa in the village financial system. Therefore this activity aims to provide training for groups of SMK Sidoarjo teachers in Economics and Accounting subjects. At the same time, this training is providing the teacher to implement village accounting lessons in the new curriculum. The training method uses a discussion and tutorial format. In the debate, the teacher offered initial material on the introduction of accounting for the government. The trainer provides The tutorial using the form of Akuntansi Desa software trials (open source). The training results show that the teacher's ability to understand accounting is sufficient; However, the control of village accounting software still needs to be improved to support "Akuntansi Desa" learning, which is part of the accounting practicum subject.

Keywords: Akuntansi Desa, teacher training, village finance applications

PENDAHULUAN

Lingkungan belajar merupakan sesuatu yang melekat pada proses pembelajaran yang dilakukan dan dialami oleh individu dalam keberadaannya

sebagai siswa yang mengalami pembelajaran di lingkungan sekolah (Foong & Khoo, 2015). Unsur-unsur lingkungan belajar mencakup semua fasilitas dan kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran siswa selama masa studi yang mendukung kegiatan belajar mengajar sehingga dapat menciptakan suasana kondusif untuk siswa yang menempati lingkungan pembelajaran tersebut (Hatane *et al.*, 2020). Keberadaan sarana dan prasarana yang terdapat dalam lingkungan belajar serta kompetensi profesional guru merupakan satu kesatuan untuk mewujudkan tercapainya proses pembelajaran yang kondusif. Keberadaan guru sangat berperan penting untuk menciptakan kualitas kondisi pendidikan yang kondusif. Untuk mendapatkan pencapaian tersebut, guru perlu diberikan pembekalan kompetensi yang menjadi materi dalam mempersiapkan bahan mengajar sehingga siswa akan termotivasi untuk mengembangkan diri sesuai arahan guru (Rustiana & Chalifah, 2012).

Pembaruan serta menyesuaikan diri terhadap pertumbuhan keilmuan baru yang bermanfaat buat membangun kecakapan siswa ataupun anak didik sehingga adaptif terhadap kebutuhan area. Tercantum dalam perihal tersebut merupakan upaya guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memenuhi dirinya dengan kurikulum akuntansi desa sejalan dengan UU No.6/2014. Modul pelatihan guru dalam aktivitas ini merupakan sosialisasi akuntansi desa berkaitan dengan terdapatnya syarat yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

Bersumber pada syarat tersebut desa dituntut untuk menyelenggarakan tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, handal, efisien serta efektif, terbebas dari tindakan yang merugikan negara (misal Korupsi). Selain itu, juga dituntut untuk mewujudkan pemerintahan yang rapi dan teratur, serta mengelola aset desa. Pengelolaan keuangan wilayah pula diatur dalam Permendagri No. 20/2018 hal Pengelolaan Keuangan Desa. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa manajemen keuangan desa adalah totalitas aktivitas yang terdiri dari aktivitas merencanakan, menerapkan, mengadministrasi, aktivitas membuat laporan, serta mempertanggungjawaban keuangan desa.. Upaya-upaya untuk mengimplementasikan akuntansi desa dilakukan oleh misalnya desa-desa Kecamatan Pariaman Utara, desa Kepatihan Kecamatan Menganti

Kabupaten Gresik, dan desa di Kabupaten Kuningan ((Pratiwi, Sebrina, & Angelina, 2019; Hanifah & Sugeng, 2015; Puspasari & Purnama, 2018)

Kegiatan ini merupakan tanggapan atas kebutuhan masyarakat sekitar dalam hal ini kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Akuntansi Sidoarjo pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya pemahaman guru SMK berkaitan dengan implementasi akuntansi desa, sehubungan dengan adabta natapelajaran baru daalam kurikulum SMK, yaitu Akuntansi dan Lembaga Pemerintahan. Dalam pandangan Rakib, Rombe, & Yunus (2017) dan (Dewi & Suhardini, 2014) pelatihan yang diberikan guru dapat berdampak pada peningkatan kompetensi dan guru. Oleh karena itu dipandang perlu untuk memberikan transfer pengetahuan mengenai akuntansi desa sebagai persiapan dan pendalaman kurikulum akuntansi yang akan dipersiapkan sebagai bagian dari kurikulum pembelajaran.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pelatihan dilakukan di Universitas Kristen Petra dalam dua pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tahun 2018 dalam bentuk seminar dengan topik akuntansi dan keuangan lembaga pemerintahan desa. Pertemuan kedua dilakukan pada bulan Oktober tahun 2019 Peserta kegiatan ini adalah kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Akuntansi Sidoarjo. Pelatihan dilakukan mulai jam 10.00 – 15.30 bertempat di Laboratorium Sistem Informasi Akuntansi Universitas Kristen Petra. Materi pelatihan yang diberikan tidak saja pemaparan mengenai teori dan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan namun juga dalam bentuk workshop menggunakan contoh aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami akuntansi desa, setiap guru diberikan pemahaman awal mengenai konsep akuntansi pemerintahan yang melandasi praktek akuntansi desa. Materi dasar yang diberikan berkaitan dengan sistem keuangan desa meliputi: pengelolaan aplikasi keuangan desa,

aplikasi akuntansi dan kode akun, review PPh 22 dan PPN, praktek aplikasi siskeudes,

Para Guru SMK diberikan penjelasan mengenai perbedaan dan persamaan karakter lingkungan akuntansi komersil dan akuntansi komersial. Effendi (2020) menjelaskan bahwa prinsip dalam akuntansi komersil diimplementasikan dalam praktek bisnis bertujuan untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Sedangkan akuntansi pemerintahan diimplementasikan dalam lingkungan entitas yang bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sepanjang dana yang ada mencukupi. Dari sisi sumber daya, entitas bisnis memiliki sumber pendapatan dari penyediaan barang dan jasa, sedangkan entitas pemerintah sumber dana berasal dari penarikan pajak.

⁹ Dalam pelatihan ditegaskan mengenai akuntansi desa dengan menjajaki prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan pemerintah cocok dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) bersumber pada PP No 71/2010³ mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP digunakan sebagai panduan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian, serta pemda mulai dari provinsi, kabupaten, kota serta badan yang bersifat memberikan pelayanan umum (BLU). Dalam pelatihan ini ditegaskan penggunaan prinsip-prinsip dalam akuntansi pemerintahan yang menerapkan basis akrual maupun basis kas. PP No. 71 menerangkan perbedaan pengakuan pendapatan jika menggunakan basis akrual atau basis kas. Jika dalam proses penyusunan³ dan pelaksanaan anggaran berdasar kas maka jika mendapatkan penerimaan³ pendapatan diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan bagi kegiatan pembelanjaan maka diakui pada saat dilakukan pembayaran. Lain hal jika menggunakan dasar akrual dimana dalam mengakui pendapatan adalah berkaitan dengan justifikasi hal penerimaan pendapatan tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa pada saat menggunakan dasar akrual maka meskipun secara kas belum diterima, namun jika pendapatan tersebut telah menjadi hal penerima, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai pendapatan. Demikian hal

nya dengan beban, dapat dicatat saat nilai kekayaan/aset bersih telah menurun walaupun secara pembayaran tunai belum dibayarkan.

Mengacu pada UU No. 6/2014, pengelolaan ¹ keuangan desa merupakan suatu wewenang ² hak dan kewajiban dalam tata kelola desa yang dapat dinilai secara moneter. Selain itu, juga mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan ² hak dan kewajiban Desa atas pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Desa memiliki beberapa sumber pendapatan yaitu pendapatan yang merupakan hasil asli dari desa (mis: hasil dari usaha, pengembangan aset, swadaya masyarakat); APBN yang diterima desa; bagi hasil PDRD; Dana Desa hasil perimbangan Kabupater/Kota; ⁸ bantuan keuangan dari APBD Provinsi; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ¹² ketiga; Pendapatan Lain-lain. Pengeluaran yang dilakukan untuk ⁷ Belanja Desa diutamakan untuk kebutuhan pembangunan yang meliputi pelayanan dasar, lingkungan, dan aktivitas pemberdayaan masyarakat Desa. Keberadaan tanah desa, tanah ulayat, pasar (umum dan hewan) ini merupakan aset desa. Jika merujuk kepada karakteristik mata pencaharian utama di sebuah desa, maka beberapa tempat yang berkaitan dengan mata pencaharian utama juga menjadi aset desa, misalnya keberadaan tempat pelelangan ikan, tempat pelelangan hasil bumi/pertanian, dermaga untuk penambatan perahun. Selain itu, pemandian umum, hutan desa juga merupakan contoh aset desa.

Pengelolaan keuangan di desa mencakup pengelolaan pendapatan, belanja dan aset desa, tidak ¹³ berbeda dengan pengelolaan akuntansi untuk entitas pada umumnya. Menurut PP No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6/2014, dalam melakukan pengelolaan atau pengaturan keuangan desa menggunakan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah bagaimana merencanakan, dilanjutkan dengan aplikasi dari yang telah direncanakan. penatausahaan, membuat laporan dan memberikan pertanggungjawaban. Satu tahun anggaran yang biasa digunakan dalam keuangan desa ¹¹ adalah mulai bulan januari sampai Desember. Laporan yang perlu disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir periode penganggaran adalah laporan yang mencakup pelaksanaan, ¹¹ pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD,

kekayaan milik ²⁰ desa dan laporan mengenai program yang masuk desa baik dari pemerintah pusat ataupun daerah (Yuliansyah & Rusmianto, 2017).

Pelatihan ini juga memberikan contoh beberapa perkiraan baru yang umumnya digunakan dalam akuntansi pemerintahan seperti ⁷ ditunjukkan dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Saldo Normal Akun

Kode	Nama Akun	Debit	Kredit
0	Perubahan SAL	√	√
1	Aset	√	
1.1	RK SKPD	√	
2	Kewajiban		√
3	Ekuitas		√
3.1	RK SKPD		√
4	Pendapatan LRA		√
5	Belanja	√	
6	Transfer	√	
7.1	Penerimaan Pembiayaan		√
7.2	Pengeluaran Pembiayaan	√	
8	Pendapatan LO		√
9	Beban	√	

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010

Sebelum sampai pada penjelasan pengelolaan keuangan desa, dalam pelatihan ini dijelaskan mengenai format penyusunan dan penganggaran keuangan desa ¹⁵ seperti ditunjukkan dalam gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. Format ¹² Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Kode Rek. 1	URAIAN 2	ANGGARAN (Rp.) 3	Keterangan/ Sumber Dana 4
	PENDAPATAN		
	Pendapatan Asli Desa		
	Hasil Usaha		
	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
	Pendapatan Transfer		
	Dana Desa		
	Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah		

Sumber: BPKP (2015)

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa mengatur lima tahap dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) penatausahaan, 4), dan pelaporan, 5) pertanggungjawaban keuangan desa, dan 6) pembinaan dan pengawasan. Sekretaris Desa bertanggung jawab menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan APBDesa tersebut kepada kepala desa.

Penatausahaan keuangan di desa diawali penetapan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Selanjutnya, peraturan tersebut digunakan untuk membuat APBD dan transaksi keuangan dilakukan dengan mengacu pada APBD tersebut, baik untuk penerimaan maupun pengeluaran kas untuk belanja dalam rangka mengoperasikan program kegiatan desa. Siklus penatausahaan dapat dalam gambar 2 berikut ini:

Gambar 2. Siklus Penatausahaan Keuangan Desa



Sumber: Yuliansyah & Rusmianto (2017)

Pelaksanaan berkaitan dengan implementasi penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang akan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Umumnya pencatatan yang dilakukan pada tahap ini masih sangat sederhana, karena sekretaris desa hanya akan memasukkan dalam buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank seperti ditunjukkan gambar 3 berikut ini.

Kode Rek.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN				
	Pendapatan Asli Desa				
	Hasil Usaha				
	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah				
	Pendapatan Transfer				
	Dana Desa				
	Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten/Kota				
	Alokasi Dana Desa				
	Bantuan Keuangan Provinsi				
	Bantuan Keuangan Kab/Kota				
	Pendapatan Lain lain				
	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
	Lain-lain Pendapatan Desa yang				

Sumber: BPKP (2015)

Laporan lain yang wajib disediakan oleh pemerintah desa adalah laporan yang menginformasikan total aset milik desa per tanggal tertentu yang disajikan secara berdampingan sehingga dapat dilihat penambahan atau pengurangan pada tanggal yang sama tahun yang berbeda. Laporan ini disebut dengan Neraca seperti dalam gambar 5 berikut ini.

Gambar 5. Format Laporan Kekayaan Desa

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Uang Kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst.....		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Desa		

Sumber: BPKP (2015)

Praktek penggunaan software akuntansi desa menggunakan Aplikasi Keuangan Desa (AKD) yaitu suatu aplikasi akuntansi keuangan berbantuan komputer dengan memanfaatkan berbantuan komputer dengan memanfaatkan

Microsoft Excel (Ms. Excel). Guru diberikan transaksi-transaksi yang akan diinput dalam software AKD seperti ditunjukkan dalam gambar 5 berikut ini.

Gambar 6. Aplikasi Keuangan Desa Ciburial



Sumber: https://ciburial.desa.id/sdm_downloads/aplikasi-akuntansi-keuangan-des/

Untuk memudahan memahami implementasi akuntansi desa, peserta pelatihan diberikan transaksi-transaksi penerimaan dan pengeluaran desa yang kemudian akan diinput dalam aplikasi Akuntansi Keuangan Desa (AKD). Beberapa contoh transaksi desa ditunjukkan dalam Tabel 2 berikut ini

Tabel 2. Contoh Input Transaksi-Transaksi

Tanggal	Transaksi
3 Januari	Ditarik uang tunai sebesar Rp 2.000.000 untuk kas operasional bendahara desa dari rekening kas desa yang ada di bank denan Bukti Bank (BB) No. 001
5 Januari	Diterima hasil sewa tanah desa untuk tahun 2015 sebesar Rp 5.000.000 dengan No. Bukti BKM 001
8 Januari	Dikeluarkan SPP No. 001 untuk pembelian alat tulis kantor guna keperluan operasional kantor sebesar Rp 150.000
8 Januari	Diterima hasil retribusi pasar desa untuk bulan Januari sebesar Rp 2.955.000 dengan No. Bukti BKM 002
9 Januari	Disetorkan ke rekening kas desa yang ada di Bank Jatim sebesar Rp 7.000.000 dengan Bukti Bank (BB) No. 002
18 Januari	Diterima hasil sewa aula desa untuk bulan Januari sebesar Rp 200.000 dengan No. Bukti BKM 003
19 Januari	Diterima pemajeg (iuran wajib warga) tahun 2017 sebesar Rp 5.625.000 dengan No. Bukti BKM 004
19 Januari	Disetorkan ke rekening kas desa yang ada di Bank Lampung sebesar 5.000.000 dengan Bukti Bank (BB) No. 003
23 Januari	Dikeluarkan SPP No. 002 untuk pembelian alat dan bahan kebersihan senilai Rp 200.000
24 Januari	Diterima hasil pemungutan atas pembuatan surat-surat desa sebesar Rp 160.000 dengan No. Bukti BKM 005
24 Januari	Dikeluarkan SPP No. 003 untuk pembelian benda pos senilai Rp. 120.000
25 Januari	Ditarik uang tunai sebesar Rp 8.000.000 dari rekening kas desa yang ada di Bank Jatim dengan Bukti Bank (BB) No. 004
25 Januari	Dikeluarkan SPP No. 004 untuk belanja pegawai dengan rincian penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp 6.000.000 dan tunjangan sebesar Rp. 2.000.000.

Dalam pelatihan ini, para peserta melakukan input transaksi dalam jurnal umum informasi yang ada dalam bukti-bukti transaksi keuangan baik kas

masuk maupun kas keluar. Pengelola keuangan desa menggunakan jurnal khusus seperti buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank sebagai pengganti jurnal seperti telah dijelaskan di atas. Buku kas umum digunakan untuk menyimpan catatan transaksi tunai yang masuk maupun keluar. Buku pembantu berfungsi mencatat aktivitas pemotongan pajak dan penyeteroran pemotongan pajak tersebut ke kas negara. Buku bank dapat digunakan untuk mencatat mutase penyeteroran ke rekening kas desa dan penarikan dari rekening kas desa pada bank (Yuliansyah & Rusmianto, 2017). Gambar 7 menunjukkan jurnal umum untuk menginput transaksi yang dilakukan oleh aparat desa yang terdapat dalam aplikasi AKD Desa Ciburial.

Gambar 7. Jurnal Transaksi

DAFTAR AKUN		81201 Tanah Kas Desa - LO						
TANGGAL	JENIS NO. BUKTI	KETERANGAN	NO AKUN	NAMA AKUN	DEBET	NO AKUN	NAMA AKUN	KREDIT
01 Jan 2017	JU BB001	Ditrans. uang tunai untuk kas operasional bendahara des	1101	Kas di Bendahara Desa	2.000.000	1102	Rekening Kas Desa	2.000.000
05 Jan 2017	JU BK1M001	Diterima hasil sewa tanah desa untuk tahun 2016	1101	Kas di Bendahara Desa	5.000.000	81201	Tanah Kas Desa - LO	5.000.000
05 Jan 2017	JU BK1M001	Diterima hasil sewa tanah desa untuk tahun 2016	31205	Estimasi Perubahan SAL	5.000.000	41201	Tanah Kas Desa - LRA	5.000.000
08 Jan 2017	JU SPP001	Pembelian Alat Tulis Kantor untuk keperluan operator	11	Persediaan Bahan Pakai Habis	150.000	1101	Kas di Bendahara Desa	150.000
08 Jan 2017	JU SPP001	Pembelian Alat Tulis Kantor untuk keperluan operator	51	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000	31205	Estimasi Perubahan SAL	150.000
08 Jan 2017	JU BK1M002	Diterima hasil retribusi pasar desa untuk bulan Januari	1101	Kas di Bendahara Desa	2.995.000	8101	Bagi Hasil Retribusi Kabupaten - LO	2.995.000
08 Jan 2017	JU BK1M002	Diterima hasil retribusi pasar desa untuk bulan Januari	31205	Estimasi Perubahan SAL	2.995.000	4301	Bagi Hasil Retribusi Kabupaten - LRA	2.995.000
09 Jan 2017	JU BB002	Disetor an ke rekening kas desa yang ada di Bank Jati	1102	Rekening Kas Desa	7.000.000	1101	Kas di Bendahara Desa	7.000.000
10 Jan 2017	JU BK1M003	Diterima hasil sewa aula desa untuk bulan Januari	1101	Kas di Bendahara Desa	200.000	81202	Bangunan Desa - LO	200.000
10 Jan 2017	JU BK1M003	Diterima hasil sewa aula desa untuk bulan Januari	31205	Estimasi Perubahan SAL	200.000	41202	Bangunan Desa - LRA	200.000
10 Jan 2017	JU BK1M004	Diterima pemajag (luran wajib warga) tahun 2017	1101	Kas di Bendahara Desa	5.625.000	81005	Swadaya dan Partisipasi Masyarakat Lainnya - LO	5.625.000
10 Jan 2017	JU BK1M004	Diterima pemajag (luran wajib warga) tahun 2017	31205	Estimasi Perubahan SAL	5.625.000	41005	Swadaya dan Partisipasi Masyarakat Lainnya - LRA	5.625.000
10 Jan 2017	JU BB003	Disetor an ke rekening kas desa yang ada di Bank Lam	1102	Rekening Kas Desa	5.000.000	1101	Kas di Bendahara Desa	5.000.000
22 Jan 2017	JU SPP002	Pembelian Alat dan Bahan Kebersihan	11701	Persediaan Bahan Pakai Habis	200.000	1101	Kas di Bendahara Desa	200.000
22 Jan 2017	JU SPP002	Pembelian Alat dan Bahan Kebersihan	51201	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000	31205	Estimasi Perubahan SAL	200.000

Setelah setiap transaksi diinput dalam jurnal umum atau jurnal khusus, maka peserta pelatihan melakukan proses posting dalam buku besar. Posting dilakukan untuk setiap transaksi keuangan yang telah diinput sebelumnya dalam jurnal umum atau jurnal khusus seperti ditunjukkan dalam gambar 8

Gambar 8. Buku Besar

No. Akun	11102	Saldo Awal	50.000.000
Nama Akun	Rekening Kas Desa	Saldo Akhir	250.000

TANGGAL	NO BUKTI	URAIAN TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1 Jan 2014		SALDO AWAL ...	50.000.000	-	50.000.000
03 Jan 2017	BB001	Ditarik uang tunai untuk kas operasional bendahara	-	2.000.000	48.000.000
09 Jan 2017	BB002	Disetorkan ke rekening kas desa yang ada di Bank	7.000.000	-	55.000.000
19 Jan 2017	BB003	Disetorkan ke rekening kas desa yang ada di Bank	5.000.000	-	60.000.000
25 Jan 2017	BB004	Ditarik uang tunai dari rekening kas desa yang ada	-	8.000.000	(8.000.000)
11 Juli 2017	BKM069	Diterima hasil sewa aula desa untuk bulan Juli	250.000	-	(7.750.000)
19 Juli 2017	BB024	Ditarik uang dari rekening kas desa yang ada di Ba	-	12.000.000	(19.750.000)
25 Juli 2017	BB025	Ditarik uang tunai dari rekening kas desa yang ada	-	10.000.000	(29.750.000)
30 Juli 2017	BB026	Rekening kas desa yang ada di Bank Jatim	-	30.000.000	(59.750.000)
TOTAL			62.250.000	62.000.000	250.000

Gambar 9 di bawah ini adalah contoh neraca saldo dalam aplikasi AKD Desa Ciburial. Neraca saldo menunjukkan semua akun yang terlibat dalam transaksi-transaksi yang dilakukan oleh aparat desa.

Gambar 9. Neraca Saldo

AKUN	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT
11101	Kas di Bendahara Desa	99.210.000	-
11102	Rekening Kas Desa	250.000	-
11103	Kas di x	-	-
11104	Kas di xx	-	-
11105	Kas Lainnya	-	-
11106	Setara Kas	-	-
11201	Investasi dalam Saham	-	-
11202	Investasi dalam Deposito	-	-
11203	Investasi dalam SUN	-	-
11204	Investasi dalam SBI	-	-

Informasi dalam gambar 10 adalah salah satu contoh pelaporan yang dibuat oleh pemerintah desa. Laporan realisasi anggaran atau LRA. LRA akan menginformasikan pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan desa.

Gambar10. Laporan Realisasi Anggaran

AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%
4	PENDAPATAN			
41	PENDAPATAN ASLI DESA			
411	Hasil Usaha Desa	-	3.500.000	-
41101	Kontribusi/Penyisihan dari BUMDesa	-	3.500.000	-
41102	Kontribusi/Penyisihan dari BUMDes	-	-	-
41103	Kontribusi/Penyisihan dari PAB-MC	-	-	-
412	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	-	48.950.000	-
41201	Tanah Kas Desa	-	10.000.000	-
41202	Bangunan Desa	-	35.450.000	-
41203	Jalan Desa	-	2.000.000	-
41204	Lain-lain Kekayaan Milik Desa	-	1.500.000	-
413	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat	-	20.445.000	-

Pelaksanaan pelatihan Akuntansi Desa berjalan baik dan lancar. Para guru SMK pada dasarnya sudah mendapatkan pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip dalam akuntansi komersial, sehingga adaptasi dalam pembelajaran akuntansi desa tidak mendapatkan hambatan. Gambaran kegiatan terlihat pada gambar 11 di bawah ini.



Gambar 11. Suasana Pelatihan

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kegiatan pelatihan bagi guru – guru Musyawarah Guru mata Pelajaran (MGMP) SMK Sidoarjo adalah upaya meningkatkan literasi akuntansi dan keuangan lembaga pemerintahan dalam hal ini desa. Pelatihan bertujuan untuk membekali para guru yang akan mengimplementasikan akuntansi keuangan daerah dalam kurikulum pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan Sidoarjo. Materi Akuntansi dan Lembaga Keuangan Pemerintah ini merupakan hal baru untuk para Guru sehingga diharapkan apa yang disampaikan dalam kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai Akuntansi dan

Keuangan Lembaga Pemerintah beserta penggunaan Aplikasi Pengelolaan Sistem Keuangan Desa.

Manfaat penelitian dapat dilihat dari perspektif praktis dan kebijakan. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk mempersiapkan siswa-siswa SMK menjadi tenaga kerja siapa pakai yang dapat membantu untuk mengimplementasikan akuntansi keuangan desa. Hal ini ditunjang dengan karakteristik kurikulum SMK yang lebih mengedapankan pada kemampuan praktikal. Secara kebijakan, pelatihan ini adalah implementasi dari kebijakan bahwa perguruan tinggi wajib mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Selain itu kegiatan ini adalah implementasi dari kebijakan pemerintah melalui UU No. 6/2014 yang mengatur bahwa desa sebagai entitas mempunyai kewenangan untuk mengelola anggaran secara mandiri dengan mengedapankan karakteristik desa.

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
3	jurnal.umrah.ac.id Internet Source	1%
4	yusranlapananda.wordpress.com Internet Source	1%
5	docplayer.info Internet Source	1%
6	Baihaqi Baihaqi, Ratih Pelita Sari, Dri Asmawanti S. "PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DESA (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara)", Jurnal Akuntansi, 2019 Publication	1%
7	id.scribd.com Internet Source	1%

repository.unhas.ac.id

8	Internet Source	1%
9	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
10	jurnal.unsyiah.ac.id Internet Source	1%
11	eprints.umpo.ac.id Internet Source	1%
12	desaciwidey.wordpress.com Internet Source	1%
13	friskymelanda.blogspot.com Internet Source	<1%
14	www.slideshare.net Internet Source	<1%
15	mafiadoc.com Internet Source	<1%
16	spiritsumbar.com Internet Source	<1%
17	idoc.pub Internet Source	<1%
18	www.pusdikipd.com Internet Source	<1%
19	faridach.wordpress.com Internet Source	<1%

20

repository.usd.ac.id
Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On